



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SOLOK
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI REMBANG
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

SELASA, 26 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Solok Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2020

PEMOHON

1. Nofi Candra, Yulfadri (Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Kuswanto, Kusnomo (Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Harno, Bayu Andriyanto (Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 14.01 WIB – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rudi Harmono
2. Mevrizal

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Detkri Badhiron
2. Prabowo

C. Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:

Bayu Andriyanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nimerodi Gulo
2. Sri Wahyuningsih
3. Karyono
4. Aperdi J. S.
5. Enny Maryani
6. Ridwan Syaidi Tarigan

E. Termohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

Yusrial

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021:

Yuli Arman

G. Termohon Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dulrokhim
2. Purnomosidi
3. Widya Astuti
4. Akmaliah
5. Rahman Hakim

H. Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:

Musoffa

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhamad Hasan Muaziz
2. Zaenal Arifin
3. Mufasir

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:

Mehbob

K. Bawaslu:

1. Afri Memori (Kabupaten Solok)
2. Andri Junaidi (Kabupaten Solok)
3. Mara Prandes (Kabupaten Solok)
4. Mice Amalia (Kabupaten Solok)
5. Romi Rindang Nahar (Kabupaten Solok)
6. Nurkholik (Kabupaten Purworejo)
7. Rinto Haryadi (Kabupaten Purworejo)
8. Anik Sholihatun (Kabupaten Purworejo)
9. Ahmad Sofa (Kabupaten Rembang)
10. M. Maftuhin (Kabupaten Rembang)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang pada sesi ketiga ini untuk memeriksa 3 perkara, yaitu Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, 29/PHP.BUP-XIX/2021, dan 20/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda yang pertama penyampaian pokok-pokok permohonan dengan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Kedua, pengesahan alat bukti Pemohon. Dan yang ketiga, penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Jadi, nanti untuk ketiga Pemohon pada perkara ini cukup menyampaikan pokok-pokok atau poin dari permohonan, toh permohonannya sudah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim. Sebelumnya dipersilakan kepada Pemohon Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 memperkenalkan siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Terima kasih, Majelis. Untuk Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 hadir, saya, Mevrizal, S.H., M.H., dan Rudi Harmono, S.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, untuk Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Purworejo?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Terima kasih, Majelis. Perkenalkan yang hadir saya sendiri, Detkri Badhiron, S.H., M.H., dan di belakang rekan saya Prabowo, S.H. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Rembang?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Yang hadir pada hari ini mewakili Calon Bupati Harno, S.E., dan Calon Wakil Bupati, Bayu Andriyanto, S.E. Saya Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H., dan rekan saya Sri Wahyuningsih, S.H. Sementara di luar lewat daring itu diikuti oleh calon wakil bupati, kemudian 3 orang Penasihat Hukum sebagaimana tertuang di dalam surat kuasa. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, untuk KPU dari Kabupaten Solok Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 silakan siapa yang hadir?

8. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: JULI ARMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini yang hadir dari Pihak Termohon Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 adalah saya sendiri, Juli Arman, S.H., sebagai Kuasa dari Termohon. Dan juga hadir Komisioner Divisi Hukum, Bapak Dr. Yusrial, S.Hi., M.A. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, Termohon untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Purworejo, silakan!

10. KPU KABUPATEN PURWOREJO: DULROKHIM

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan kami dari KPU Purworejo yang hadir di sini Dulrokhim selaku Ketua KPU, beserta Purnomosidi, Anggota KPU. Kemudian hadir secara daring, Widya Astuti, Akmalia, dan Rahman Hakim.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah? Baik. Termohon untuk Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Rembang?

12. KPU KABUPATEN REMBANG: MUHAMAD HASAN MUAZIZ

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ

Kami dari Termohon Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021, di sini saya hadir, Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., bersama Prinsipal kami ada Bapak Mustofa. Kemudian, di daring ada Bapak Mufasir dan Bapak Zaen. Mohon izin, Yang Mulia kami mau menyampaikan surat kuasa.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti dengan Kepaniteraan, ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti diambil. Baik, sekarang Bawaslu untuk Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Solok, silakan siapa yang hadir?

18. BAWASLU KABUPATEN SOLOK: ANDRI JUNAIDI

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Solok untuk Perkara Nomor 77 PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya sendiri, Andri Junaidi, M.H., Divisi Hukum dan Penyidikan Pelanggaran. Kemudian, juga hadir dari Ketua Bawaslu Bapak Afri Memori, S.E. Kemudian juga yang dari online yang hadir dari Divisi Pengawasan, Bapak Mara Prandes, S.Kom., kemudian ada Ibu Mice Amelia dengan Bapak Romi Rindang Nahar. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Bawaslu Kabupaten Purworejo?

20. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NURKHOLIK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri, saya Nurkholik, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo hadir didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo,

Saudara Rinto Hariyadi dan secara online juga hadir Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Anik Sholihatun. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam. Ya, terakhir, Bawaslu Kabupaten Rembang, silakan!

22. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: AHMAD SOFA

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia kami dari Bawaslu Kabupaten Rembang, perkenalkan nama saya Ahmad Sofa selaku Divisi Hukum, bersama kami dengan Pak M. Waftuhin, Divisi Pengawasan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung, untuk Pemohon Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Waktu paling lama 10 menit. Dipersilakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Terima kasih, Majelis. Sebelum kami bacakan, Majelis, ada yang pengetikkannya ada typo, Majelis. Mohon kami sebutkan halamannya, Majelis. Belum dibacakan, berkenan, Majelis. Ada Pasal 158 ayat (1) harusnya ayat (2) terketik ayat ... angka (1).

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Nanti kita perbaiki, Majelis. Kemudian jumlah di halaman 9, kita perbaiki menjadi 61.486. Kemudian di halaman 13, TPS 9 harusnya TPS 2. Kemudian, di halaman 16, poin ke-2 video di TPS 24 Nagari Pana ... Sungai Nana yang tertulis kita perbaiki menjadi Sungai Nanam, Majelis. Itu ... itu untuk perbaikan, Majelis. Apakah kami sampaikan yang diperbaiki itu sebelum dibacakan, Majelis? Ada 4 ... 4 poin itu, Majelis.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pemohon, ya, Kuasa Pemohon.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan perbaikan permohonan ini kan sudah diberikan waktu untuk dilakukan. Jadi, silakan untuk dilakukan apapun yang diinginkan untuk diperbaiki dari permohonan awal, ya. Kemudian, kalau terkait dengan perubahan-perubahan, ya, yang untuk ... apa namanya ... dimintakan di renvoir.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tidak boleh menyangkut aspek yang substantif sifatnya. Hanya hal-hal yang misalnya typo saja, ya. Jadi, kalau misalnya substantif ada angka segala macam itu ... itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya boleh yang typo-typo. Karena batas waktu perbaikan memang sudah diberikan sepenuhnya pada saat perbaikan pe ... apa Namanya ... permohonan. Seperti itu, ya. Itu berlaku untuk semua panel.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Berlaku, Majelis.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua panel sama.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Walaupun hanya hurufnya yang salah ketik, Majelis, ya?

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lah kan kalau huruf misalnya salah misalnya tuh (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Hurufnya ini ... misal, Majelis. Saya ketiknya 9 harusnya 2, Majelis. Apakah ini berkenan untuk diperbaiki?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti akan kami pertimbangkan, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya, terima kasih, Majelis.
Boleh dilanjutkan, Majelis?

40. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Makasih, Majelis.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya.

Permohonan Perkara No. 77/PHP.BUP-XIX/2021. Pokok-pokok permohonan. Pertama, terjadi pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah oleh Pemohon ... oleh KPPS sehingga menjadi

suara tidak sah. Itu kita ... kami uraikan dalam berapa uraian, tidak kami bacakan.

Kemudian, untuk poin selanjutnya, banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 kali dalam pencoblosan surat suara pemilih ... kami ulangi. Banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 kali dalam pencoblosan surat suara pemilih lainnya oleh Petugas KPPS serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon.

Ketiga, adanya politik uang yang masih terjadi ... terjadi yang dilakukan oleh Laskar Merah Putih dan dijadikan simbol kebal hukum demi Paslon 02 serta keberpihakan 74 Walinagari di Kabupaten Solok. Itu pokok permohonan, Majelis.

Kemudian, kami bacakan petitemnya, Majelis.

Bedasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Solok No. 255/PL.02.6-KPT/1302/KPU-Kab/VII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Putusan KPU Solok Nomor 255 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1 H. Nofi Candra, S.E., Yulfadri Nurdin, S.H.=61.486.
 2. Kemudian, H. Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu=59.625.
 3. Drs. Asri ... H. Desra Ediwan Anantatur, M.M., dan DR. Adli, S.E., M.Si.=28.490 suara.
 4. Ir. H. Iriadi Datuak Temanggung, Agus Syahdeman, S.E.=22.048 suara

Total suara sah 170 ... 171.649.

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di
 1. Seluruh TPS di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin.
 2. Seluruh TPS di Nagari, Sunai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti.
 3. Seluruh TPS di Nagari Supayang dan seluruh TPS di Di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki.
 4. Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS di Nagari Koto Gadang, Koto Anau, dan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya. Kemudian seluruh TPS di di Nagari Sumani, seluruh TPS di Nagari Cikala,

seluruh TPS Koto Sani, seluruh TPS di Nagari Aripan, seluruh TPS di Nagari Kacang, dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai di Kecamatan Sepuluh Koto Singkarak. Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik, seluruh TPS di Nagari Paninjauan, seluruh TPS di Nagari Kucir, seluruh TPS di Nagari Katialo, seluruh TPS di Nagari Pasilihan, seluruh TPS di Nagari Bukik Kandung, seluruh TPS di Nagari Sibarambang, dan seluruh TPS di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan Sepuluh Koto di atas. Selanjutnya, seluruh TPS di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih. Selanjutnya, seluruh TPS di Nagari Talang Babungo, dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti. Seterusnya, seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar. Selanjutnya, pada TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan Sepuluh Koto Singkarak. Selanjutnya pada TPS 8, TPS 2, TPS 28 di Nagari Selayo Kecamatan Kubung. Kemudian, pada TPS 24 Di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Pada TPS 2, TPS 4, dan TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan Sepuluh Koto Singkarak, selanjutnya pada TPS 6, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Di Nagari Salimpat ... Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti. Selanjutnya, pada TPS 17 Di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki. Selanjutnya, pada TPS 1 dan TPS 7 Di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pemohon. Hadir, Mevrizal, S.H., M.H dan Rudi Harmono.

Demikian, Majelis pokok permohonan kami karena juga Majelis tadi sampaikan sudah dibaca pokok permohonan, jadi kami langsung to the point seperti ini Majelis. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, ada catatan dari Majelis Panel. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Kuasa Pemohon?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Siap, Majelis.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan kami mencocokkan saja antara Pemohon permohonan awal dan perbaikan, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya, Majelis.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Khususnya terkait dengan tanda tangan di Kuasa Hukum. Ini tanda tangan di kuasa hukum ini yang tanda tangan yang bersangkutan atau ada yang lain?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Tanda tangan yang bersangkutan, Majelis.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang bersangkutan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, kami cocokkan juga dengan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, nanti Saudara coba lihat, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya, Majelis.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini apakah ini benar tanda tangan yang bersangkutan ada perbedaan di situ. Perbedaan itu antara permohonan awal dengan kemudian kuasa dan permohonan perbaikan, ya. Untuk pertama, Saudara Febrio, Saudara Danil Mulia, dan Saudara Rudi Harmono. Nanti Saudara cek lagi, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya, Majelis.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara siapa namanya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Mevrizal, Majelis.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mevrizal, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang perlu diklarifikasi tanda tangan yang bersangkutan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini penting sekali, jangan sampai kemudian ada yang menandatangani bukan yang bersangkutan, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Siap, Majelis.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Demikian saya kira. Terima kasih Pak Ketua.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kemudian, untuk Pemohon mengajukan ini dulu, ya, Bukti P-1 sampai dengan P-33, benar?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Benar, Majelis.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk Perkara 77/PHP.BUP-XIX/2021 ini ada permohonan dari H. Epyardi Asda, M. Mar dan Jon Firman Pandu untuk menjadi Pihak Terkait. Sudah dibaca dan dipertimbangkan oleh Majelis Panel, sehingga telah diambil ketetapan, yaitu.

1. Menerima H. Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi demikian, untuk Calon Pihak Terkait sekarang sah menjadi Pihak Terkait.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2020, dipersilakan untuk membacakan poin-poinnya saja sama seperti tadi Pemohon Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 waktu 10 menit. Silakan!

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Terima kasih. Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya Detkri Badhiron, S.H., M.H dan rekan saya Prabowo adalah kuasa Hukum pada Kantor Advokat WB Law and Partner dalam hal ini mewakili klien kami, H. Kuswanto dan pasangannya, Kusnomo, adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Purworejo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan keputusan KPU ... berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

Pokok-pokok permasalahan Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah kami daftarkan pada online ... pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.33 WIB dengan APP Nomor 30/PAN.MK/2020

dan telah dilakukan verifikasi atau perbaikan pada tanggal 4 Januari 2021 dengan tanda bukti nomor 155 PBUP/PAN/MK/2021. Kami bacakan poin-poinnya.

Bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ... pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau kemudian petahana yang bersangkutan aktif sebagai kepala daerah berhasil ... pernah berhasil Pemohon temukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan ratusan eksemplar kalender senilai Rp2,4 miliar. Pengadaan kalender dengan gambar foto Pihak Terkait yang dibagikan kepada masyarakat tidaklah rasional dan patut diduga mengandung unsur kampanye terselubung
2. Pemasangan spanduk-spanduk di tiap-tiap sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP, dengan foto pasangan petahana. Kegiatan tersebut diduga memiliki unsur muatan kampanye terselubung.
3. Pembuatan kaos dengan tag ... tagline Teklek Kecemplung Kalen, program kopi bareng, program gowes bareng, silaturahmi alim ulama dengan uang saku sebesar Rp 300.000,00.
4. Penyalahgunaan program PKH, dan terbukti adanya ASN yang mendapat ... ASN camat yang telah mendapatkan sanksi dari KASN atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Purworejo, keterlibatan camat adanya money politic.

Selanjutnya, perkenalkan Pemohon menyampaikan bahwa runtutan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut adalah rangkaian yang menjadikan Pilkada Purworejo Tahun 2020 tidak demokratis sesuai dengan Amanat Konstitusi. Pelaksanaan Pilkada 2020 tidak demokrasi sesuai dengan Amanat Konstitusi tersebut diperparah dengan pro ... profesionalisme KPU dan jajarannya. Dari ... dari hasil penelusuran Pemohon, terdapat beberapa TPS yang berhasil terakses C-1 daftar hadir KWK. Pemohon menemukan sedikitnya 38 TPS yang terjadi selisih suara, tanda tangan dengan surat suara yang digunakan atau jumlah suara sah dan tidak sah. Padahal dokumen C daftar hadir KWK adalah salah satu dokumen penting yang harus klir dan tidak ada selisih antara jumlah tanda tangan C daftar hadir KWK dengan pasangan suara yang digunakan.

Dengan adanya temuan Pemohon terhadap banyaknya jumlah tanda tangan dan surat suara yang digunakan, patut diduga bahwa KPPS ke-5 tersebut tidak menjalankan regulasi yang ada. Bahkan Pemohon juga menemukan adanya sejumlah C daftar hadir KWK yang hanya dicontreng, ceklis, atau bahkan dipalsukan tanda tangannya oleh KPPS. Menurut Pemohon, ketepatan presisi jumlah tanda tangan dan daftar C hadir KWK dengan surat suara yang digunakan sangat penting sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahapan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Dengan banyaknya selisih tanda tangan dan jumlah surat suara yang digunakan, patut diduga bahwa jajaran KPU Kabupaten Purworejo telah lalai, tidak melakukan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai mana amanat Undang-Undang. Pemohon juga menduga adanya keberpihakan KPU Kabupaten Purworejo terhadap Pihak Terkait karena dinilai telah terjadi kesalahan prosedur selalu dimenangkan oleh Pihak Terkait.

Pemohon juga menduga bahwa ketidaksinkronan data tersebut karena adanya penyalahgunaan surat suara dengan adanya lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan atau 1 orang peilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih terdapat kesempatan memberikan sura ... suara pada TPS sehi ... sehingga yang dilaku ... sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU.

Perlu diketahui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa 38 TPS yang berhasil kami dapatkan alat buktinya berupa C daftar hadir KWK tersebut adalah merupakan hasil sampling, hanya kepada beberapa kecamatan dan beberapa TPS yang jumlahnya tidak lebih dari 20% dari setiap TPS. Untu ... untuk memenuhi rasa keadilan, maka kami meminta kepada Pihak Termohon untuk membuka C daftar hadir KWK dan memeriksa kecocokan surat suara yang digu ... yang digunakan di sera ... 9 ... 1.901 TPS se-Kabupaten Purworejo.

Petitum, langsung saja kami bacakan petitum, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatas ... membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 juncto Berita Acara Nomor 107/PL.02.6BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB.
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 atas nama H. Kuswanto dan Kusnomo selaku pemenang pemilihan kp ... Pemilihan

Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dengan perolehan sat ... 149.005 suara.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan ... pemungutan suara ulang di Kecamatan Bener, Desa Karang Sari, Benowo di 2 ... 2 TPS Benowo, 2 TPS Karang Sari, Pekacangan, Kaliboto, Kaliwader, Medono, Guntur ... Guntur ada 3 TPS, Jati, Ketosari, Kamijoro, Sukowuwuh ada 4 TPS, ngasinan 2 TPS.

Kemudian di Kecamatan Purworejo, ada 3 TPS di Kecamatan ... di Desa Sidomulyo. Kecamatan Bayan ada 4 TPS sa ... du ... 1 di Jatingarang, 3 di Pogung Juru Tengah. Kecamatan Gebang, ada 2 TPS.

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum juncto Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto-Kusnomo.

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Purworejo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020 sepanjang menyangkut perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Kuswanto dan Kusnomo yang benar menurut Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Pasangan Nomor Urut 1 Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli=115.826.
2. Pasangan Nomor Urut 2 H. Kuswanto dan Kusnomo=4 ... 149.005.
3. Pasangan Nomor Urut 3 R. H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti=139.509.

Sehingga total hasil suara menjadi 400 ... 400.340.

7. Memerintahkan kepada kop ... kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan in ... putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Yang terhormat, Majelis Konstitusi, dari ringkasan permohonan kami. Kami juga mohon izin, apabila diperkenankan kami mau menyampaikan lagi tambahan alat bukti.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Baik. Ada catatan dari Majelis Panel? Silakan, Yang Mulia!

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Begini, Kuasa Pemohon, ini siapa namanya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Detkri Badhiron, S.H., M.H.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Detkri Badhiron, ya? Ini kuasa yang dipakai ini, kuasa yang tanggal berapa?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Kuasa yang ke-2, yang perbaikan.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

21 Desember 2020, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Betul.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

21 Desember. Ya. Ini di dalam perbaikan ada Sutejo Sapto Jalu ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Betul.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu belum tanda tangan ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Betul, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dicek. Kemudian, yang berikutnya adalah coba dicek tanda tangannya ini, tanda tangannya Amir Hamzah, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Amir Hamzah, kemudian tanda tangannya tanda tangannya Saudara juga, Dektri Badhiron?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Antara permohonan dan kuasa. Ya. Itu coba Sodara cek, ya. Dua itu yang ada perbedaan di situ. Tapi tanda tangan asli, toh, Saudara Dektri?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Saya tanda tangan, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian yang berikutnya ini, terkait dengan penetapan dari KPU itu jam berapa? Tanggal berapa, jam berapa?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Penetapan KPU tanggal Selasa, 15 Desember 2020 pukul 17.48 WIB, Majelis.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, penetapannya adalah 17 ... 15 Desember 2020 pukul?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

17 (...)

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

17.48 WIB.

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17.48 WIB. Ya. Termasuk diumumkan juga itu ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Betul.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ... da ... da ditetapkan dan diumumkan langsung, gitu?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Ya.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di 17.48 WIB itu ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Betul. Menurut Berita Acara yang kami terima seperti itu.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya. Baik. Itu saja yang perlu klarifikasi. Terima kasih.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Untuk Bukti yang diajukan oleh Pemohon Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 ada 73. P-1 sampai dengan P-73, benar?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON

Benar, Yang Mulia.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian selanjutnya, dalam perkara ini ada permohonan dari RH. Agus Bastian, S.E, M.M dan Hj. Yuli Hastuti S.H untuk menjadi Pihak Terkait oleh Majelis Panel telah membaca dan mempertimbangkan dengan demikian ketetapannya adalah:

1. Menerima RH Agus Bastian S.E, M.M dan H. Yuli Hastuti, S.H, pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut, guna menghadiri sidang pada hari, tanggal dan pukul yang telah ditetapkan, untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ya, demikian. Jadi, tadi masih calon Pihak Terkait sekarang sudah resmi jadi Pihak Terkait.

Terakhir untuk sesi ini Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 ... dan ini perlu di ... baik, untuk catatan terkait dengan permohonan sebagai Pihak Terkait itu ada 2 permohonan dengan 2 Kuasa Hukum yang berbeda. Ketetapan sebagai Pihak Terkait nanti diterbitkan dalam 1 ketetapan karena keduanya diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo.

Kemudian untuk selanjutnya, keterangan Pihak Terkait nanti disampaikan pada sidang pemeriksaan persidangan yang digabung dalam satu-kesatuan keterangan. Jadi, walaupun ada 2 permohonan atau 2 Kuasa Hukum, keterangan Pihak Terkait nya nanti disatukan. Itu catatan, ya.

Baik, berikut untuk Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan!

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik, terima kasih ...

106. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sama ya, 10 menit paling lama.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamu'alaikum wr. wb, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Saya membacakan pokok-pokok perkara dan petitum permohonan kami, perlu beberapa hal yang Saya sampaikan.

Pertama, soal typo di halaman 7 poin 7, seharusnya tertulis 15 Desember 2020 tetapi tertulis 15 Desember 2010, 2020 seharusnya menjadi 2010. Mohon bisa menjadi catatan dikoreksi menjadi benar, Yang Mulia. Yang kedua, dalam surat kuasa pada perbaikan telah ada perubahan dari 3 pengacara menjadi 7 dan selang beberapa hari kemudian ada penambahan surat kuasa lagi 1. Sehingga kami mohon Majelis Hakim, Yang Mulia, diperkenankan surat kuasa baru nanti menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam surat kuasa tertanggal 21 Desember 2020.

Yang Mulia, kami menyadari bahwa sesungguhnya perubahan yang kami lakukan, kami daftarkan tanggal 17 Desember 2020 dan kemudian kami diberi waktu untuk melakukan perubahan 3 hari kemudian yaitu tanggal 21 Desember 2020 karena ada hari Sabtu dan hari Minggu sehingga jatuh di tanggal 21 Desember. Sesungguhnya sesuatu yang tidak berkeadilan bagi kami karena kami selaku Pemohon merasa bagian yang tidak punya kekuasaan untuk mendapatkan data-data secara komplit dibanding dengan Pemohon yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh kekuasaan mencari informasi dan bukti.

Oleh karena itu, maka pada persidangan hari ini sekalipun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang terjadi hari ini hanya typo, tetapi kami mohon

kepada Majelis, Yang Mulia. Semata-mata demi keadilan dalam posisi yang berbeda antara Pemohon dengan KPU yang memiliki kekuasaan yang berbeda. Kami nanti akan tetap mengajukan perubahan permohonan kami walaupun hari ini kami membacakan permohonan perbaikan tanggal 21 Desember 2020. Hal ini kami lakukan, kami yakin dan percaya bahwa Yang Mulia, Majelis Hakim tidak akan terpaku 100% terhadap PMK Nomor 6 Tahun 2020 semata-mata demi keadilan. Karena itu apakah nanti ditanggapi oleh Termohon dan Terkait, tetapi kami tetap memohon kepada Yang Mulia diperkenankan kami tetap mengajukan perubahan itu sekali lagi semata-mata demi keadilan dalam keseimbangan posisi Pemohon dengan Termohon.

Yang Mulia, sebelum saya membacakan pokok-pokok pemikiran, saya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati yang juga hadir secara daring, barangkali ada satu kata, dua kata yang perlu disampaikan, sehingga isi hati dan pengalaman selama proses ini bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya, termasuk kemudian Prinsipalnya. Silakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak perlu tambahkan misalnya, prolognya, dan lain sebagainya karena waktunya kan terbatas.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Ya, oke, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Saudara sampaikan. Nanti kalau ada tambahan yang masih terkait dengan permohonan, silakan kalau Prinsipal mau menambahkan, ya! Jadi, tidak perlu kemudian menyampaikan uneg-uneg segala macam yang di luar pokok permohonan yang sudah ada. Silakan saja sampaikan sekarang pokok-pokok permohonannya.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik, Yang Mulia, saya akan teruskan.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Langsung pokok-pokoknya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik, Yang Mulia, saya jelaskan bahwa pada tanggal 17 Desember itu kami mengajukan bukti keempat ... lima, dan pada perubahan kami mengajukan Bukti 44 dan pada hari ini kami mengajukan bukti tambahan menjadi 251 alat bukti, sehingga mohon bisa diterima alat bukti itu, Yang Mulia.

Kami hari ini diwakili ... mewakili Calon Wakil Bupati H. Harno, S.E., dan Wakil Calon Bupati, H. Bayu Andriyanto, S.E., dalam hal ini saya Nimerodi Gulo dan Sri Wahyuningsih akan membacakan pokok-pokok pikiran dalam permohonan ini.

Yang pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin, Yang Mulia dianggap dibacakan.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat, ya. Silakan!

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Kedua, kedudukan hukum Pemohon, mohon izin juga dianggap dibacakan.

Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon izin juga dianggap dibacakan.

Pokok-pokok permohonan, saya langsung pada poin 10 atau sebelumnya pada poin 8. Selisih antara suara H. Harno. S.H., ... S.E., H. Bayu Andriyanto, S.E., dengan Nomor Urut 2, H. Abdul Hafidz dan Mochamad Hanies Cholil adalah dalam posisi 5.501. Menurut Pemohon, perselisihan suara Pemohon tersebut di angka 8 dan 9 disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, utamanya pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

- a) Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau melebihi ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang mana mengatur jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS sebagai cadangan. Hal ini terjadi pelanggaran di beberapa TPS, yaitu:

1. TPS 5 di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang.
2. TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.
3. TPS 3 di Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan.
4. TPS 2 Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan.
5. TPS 5 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan.
6. TPS 1 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan.
7. TPS 5 Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan.
8. TPS 4 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang.
9. TPS 1 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.
10. TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.
11. TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang.

Semuanya itu melanggar Pasal 87, artinya melebihi 2,5% dari kartu suara.

Bagian kedua, jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau kurang dari ketentuan Pasal 87. Yaitu terdapat di TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang.

2. TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang.
3. TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang.
4. TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang.
5. TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan.
6. TPS 2, Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan.

Bagian ketiga, C, ditemukan pemilih pindah yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5-KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU No. 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi di 5 tempat.

1. TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.
2. TPS 3 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.
3. TPS 4 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.
4. TPS 5 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, dan
5. TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dipercepat sekiranya, waktu sisa 2 menit.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik. Ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa TPS. Yaitu: 1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 3, TPS 1. Mohon dilengkapi, Yang Mulia. Saya bacakan singkat-singkat saja.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Pelan-pelan saja.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

TPS 1 No. 7 ... TPS 1 ... TPS 1 Desa Pamotan.
TPS 1 Desa Magetan, di TPS 1 Desa Ketangi, TPS 1 Gegersimo, TPS 1 Sumberejo, TPS 3 Desa Sumberejo, dan mohon dianggap dibaca yang lain.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu kami juga baca sebenarnya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Oke.

122. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung amar saja.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Amar saja.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, mohon ... Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang No. 200/PL.02.6-KPT/3317/KPU-KAB/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun

2020, tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Mohon dianggap dibacakan.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penasihat Hukum, DR. Nimerodi Gulo, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H., dan lain-lain.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Tadi Pihak Terkait ingin menyampaikan apa tadi?

Ya ... salah. Prinsipalnya. Silakan kalau ada 1 (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Silakan, Pak Bayu! Kalau ada 1 kata yang perlu disampaikan.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Ya jangan 1 kata, lah. Satu kalimat, gitu.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Satu kalimat.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Kalau ada. Kalau enggak ada, ya sudah.

129. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: BAYU ANDRIYANTO

Ada, ada, Yang Mulia.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Lho kok hilang.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak ada, ya?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Tadi sudah mulai ngomong dia, Pak. Kok hilang di ... anu (...)

133. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: BAYU ANDRIYANTO

Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pada Majelis yang hadir di sini, tentunya semuanya. Tidak bisa saya katakan satu persatu. Pertama, saya sebagai calon wakil bupati dan kali ini juga masih menjabat, tentu saya memohon kepada Majelis apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum kita dari beliau Pak Gulo juga. Bahwa kami ada tambahan, baik data, baik juga petitum, dan posita yang sudah kami lakukan terkait ... kalau waktunya hanya 3 hari, tentu kami dengan sangat memohon kepada Ketua Majelis, saya mohon dengan sangat. Karena temuan-temuan setelah kami resapi, kami telusuri, dengan waktu yang ada, ternyata kami menemukan yaitu bukti-bukti baik saksi, baik keterangan dan juga fakta yang di lapangan. Yaitu terjadinya terstruktur, sistematis, dan masif.

Jadi, tambahan-tambahan keterangan yang kami mohon, tentu saya berharap ada pertimbangan khusus karena kami tentu berharap ada ... yaitu sesuai dengan Pemilu yaitu luber dan jurdil. Sekaligus kami memohon supaya keadilan ini, berdemokrasi ini, semua bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.

134. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

135. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: BAYU ANDRIYANTO

Terima kasih dari saya, kurang-lebih ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

136. KETUA: ANWAR USMAN

Ada catatan dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begini saya kira, ya, kepada Kuasa Pemohon dan Pak Bayu, ya, itu kalau terkait dengan posita maupun petitum itu kan memang sesuatu yang sangat fundamental dalam suatu permohonan, ya, tiba-tiba ditambah di anu kan nanti apa artinya sebuah perbaikan permohonan, yaitu hal yang berkaitan dengan itu haknya Saudaralah untuk kemarin pada waktu diberikan waktu melakukan perbaikan permohonan. Tetapi, kalau mau menambahkan bukti-bukti silakan Anda bisa melakukan penambahan bukti-bukti, ya. Silakan Anda tambahkan bukti-bukti mana untuk memperkuat dalil-dalilnya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Izin, Yang Mulia. Kami sekalipun itu ditolak atau diterima kami memohon agar diperkenankan kami tetap menyerahkan itu. Apakah dijawab oleh Termohon atau tidak apakah dipertimbangkan atau tidak mohon kepada Majelis Hakim demi keadilan substantif. Tiga hari itu adalah sesuatu yang tidak berkeadilan jika dibandingkan dengan posisi Pemohon dengan Termohon sebagai penguasa punya kekuasaan untuk memperoleh (...)

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini Kuasa Pemohon, ya, sudah dimengerti (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang Saudara mau sudah dimengerti, silakan Saudara sampaikan saja nanti dicatat, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini untuk surat kuasa itu terjadi perbedaan itu ada dua surat kuasa, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Ya.

145. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertama tanggal 17 Desember kemudian ada yang 15 Desember yang di 17 itu ada 3, ya?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Ya.

147. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dr. Nemerodi Gulo, Karyono, Sri Wahyuningsih. Kemudian, di yang tanggal 15 itu selain yang ketiga itu tambah Aperi Sitomurang, Enny Maryani, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, itu ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Ya, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Betul itu? Dua, jadi surat kuasanya?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Betul, Yang Mulia. Ada perubahan.

151. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, dan kemudian yang (...)

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Hari ini.

153. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada identitas kartu tanda anggota kuasa hukum itu hanya Nimerodi Gulo dan Sri Wahyuningsih, sementara yang lain tidak ada?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Siap, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu nanti diusulkan, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Baik, Yang Mulia.

157. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi betul, ya fakta ini, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: NIMERODI GULO

Betul.

159. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu saja.

160. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, selanjutnya pengesahan alat bukti. Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-23, benar?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021: MEVRIZAL

Betul, Yang Mulia.

162. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya dalam perkara ini ada permohonan dari H. Abdul Hafidz dan H. M. Hanies Cholil Barro', ya, untuk menjadi Pihak Terkait. Oleh Majelis Panel telah membaca dan telah mempertimbangkan, sehingga Majelis menetapkan.

1. Menerima H. Abdul Hafidz dan H. Mochammad Hanies Cholil Barro' Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 20 dan seterusnya.
2. Memerintah kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, mulai sekarang sudah resmi menjadi Pihak Terkait. Selanjutnya atas ketiga perkara ini persidangannya ditunda. Untuk Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Senin, 1 Februari 2021, waktu pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Jadi yang disebut lebih awal waktu belakangan sore. Dengan agenda pemeriksaan persidangan mendengarkan keterangan jawaban ... keterangan mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti.

Kemudian, untuk Perkara 29/PHP.BUP-XIX/2021 dan 20/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Rembang ditunda hari Selasa, 2 Februari 2020, waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, dengan agenda yang sama.

Lalu catatan, tambahan, 1 jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Jadi, pada hari persidangan tanggal 2 Februari itu bisa diajukan terlebih dahulu. Termasuk kalau ada bukti tambahan, seperti yang disampaikan oleh salah satu Pemohon tadi.

Yang ketiga, ketetapan Pihak Terkait, akan disampaikan kepada Pihak Terkait melalui e-mail dan whatsapp. Jadi, nanti disusul.

Keempat, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak lagi ... tidak ada lagi surat menyurat. Jadi sudah jelas, ya?

Jadi, untuk Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Senin, untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Selasa. Baik, selanjutnya sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

